

## **PARTISIPASI DAN DESENTRALISASI DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA**

**Oti Kusumaningsih<sup>1\*</sup>**, Emiraldo Win Pazqara<sup>2</sup>, Johar Ma'muri<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

\*Korespondensi : [oti.kusumaningsih.msi@gmail.com](mailto:oti.kusumaningsih.msi@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan keberdayaan bagi masyarakat miskin. Desa Ketenger merupakan salah satu desa di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, namun penerimaan program pemberdayaan masyarakatnya belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai partisipasi dan desentralisasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Ketenger. Sebagai upaya mendalami masalah penelitian, digunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif dari Miles et al. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam pengembangan desa wisata di Desa Ketenger dinilai masih kurang aktif. Hal tersebut dikarenakan minimnya peran masyarakat Desa Ketenger dalam proses perencanaan hingga pengembangan desa wisata di Desa Ketenger. Senada dengan aspek partisipasi, desentralisasi pada program pemberdayaan melalui pengembangan desa wisata di Desa Ketenger masih bersifat satu arah, berpusat pada atau top down, seluruh kegiatan dilaksanakan berdasarkan instruksi pemerintah desa saja. Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang terjadi hanya bersifat formal, belum sesuai dengan idealita dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

**Kata Kunci :** Desa Wisata; Desentralisasi; Partisipasi; Pemberdayaan.

### **ABSTRACT**

Community empowerment is one of the poverty alleviation efforts carried out by the government with the aim of realizing empowerment for the poor. Ketenger Village is one of the villages in Baturraden District, Banyumas Regency which has a high poverty rate, but the acceptance of the community empowerment program is not adequate. This study aims to examine in more depth about participation and decentralization in community empowerment through the development of tourism villages in Ketenger Village. In an effort to explore the research problem, descriptive qualitative methods were used through in-depth interviews, observation and documentation. Data analysis was performed using the interactive analytical model of Miles et al. The results showed that participation in the development of tourist villages in Ketenger Village was considered to be less active. This is due to the minimal role of the Ketenger Village community in the planning process to the development of a tourist village in Ketenger Village. In line with the participation aspect, decentralization in empowerment programs through the development of tourist villages in Ketenger Village is still one-way, centered on or top-down, all activities are

carried out based on village government instructions. These findings indicate that community empowerment that occurs is only formal, not in accordance with the ideals of community empowerment itself.

**Keywords :** Decentralization; Empowerment; Participation; Tourism Village.

#### A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang hingga saat ini masih belum menemukan solusi terbaiknya. Kemiskinan pada berbagai aspeknya telah berdampak bagi individu dan kelompok masyarakat (Ras, 2013). Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Kabupaten dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi. Berikut merupakan data tentang jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Banyumas pada tahun 2019, 2020 dan 2021:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas 2019-2021

No	Kemiskinan	Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas		
		2019	2020	2021
1.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	211,60	225,84	232,90
2.	Presentase Penduduk Miskin (persen)	12,53	13,26	13,66
3.	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita /Bulan)	385.140,00	406.250,00	417.086,00

Sumber : BPS Banyumas, 2021.

Berdasarkan data pada tabel 1, diketahui bahwa jumlah kemiskinan di Kabupaten Banyumas meningkat di setiap tahunnya, yaitu sebanyak 0,73 persen di tahun 2020 dan sebanyak 0,40 persen di tahun 2021. Hal tersebut diikuti dengan peningkatan jumlah garis kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan dengan hanya mengandalkan satu aspek saja,

namun program yang digunakan sebagai upaya pengentasan kemiskinan tersebut juga harus bisa memberikan stimulus ke arah pemberdayaan masyarakat.

Dewasa ini, pemberdayaan masyarakat banyak dikaji oleh berbagai bidang termasuk kesehatan (Laverack, 2007; Wallerstein, 2002), modal sosial (Mohan dan Stokke, 2000; Woolcock dan Sweetser, 2002) dan pengembangan masyarakat (lihat Skerratt dan Steiner, 2013). Hasil dari pemberdayaan komunitas harus tentang komunitas yang menjadi atau merasa lebih memegang kendali dan / atau mendapatkan kemampuan untuk mengubah atau mempengaruhi aspek rumah, lingkungan dan komunitas mereka (secara individu dan kolektif) (Lawson dan Kearns, 2014). Tantangan utama dalam suatu pemberdayaan masyarakat adalah mengenai bagaimana cara mengatasi suatu hubungan kekuasaan yang ada di dalam dan di luar masyarakat (Fisher, 1997; Williams, 2004).

Program-program pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum tuntas menangani masalah kemiskinan yang terjadi. Program yang diberikan hanya dapat mengatasi berbagai permasalahan secara sesaat. Hal tersebut membuktikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah belum dapat mewujudkan keberdayaan bagi masyarakat miskin, termasuk berbagai program yang dinanai oleh dana desa. Program dana desa

seringkali digunakan untuk pengembangan wisata yang ada di desa tersebut.

Sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar kepada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Adhikrisna, 2016). Seiring dengan perkembangan zaman, variasi pariwisata mengalami berbagai inovasi. Salah satu jenis pariwisata yang saat ini banyak digemari adalah desa wisata.

Salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas yang menggunakan program

pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata sebagai upaya pengentasan kemiskinan adalah Kecamatan Baturaden. Masing-masing desa di Kecamatan Baturaden memiliki upayanya sendiri dalam melakukan pemberdayaan desa yang dilakukan dengan dukungan dana desa. Berikut merupakan data dana desa di Kecamatan Baturaden pada tahun 2015, 2016 dan 2017:

Tabel 2. Jumlah Dana Desa di Kecamatan Baturaden Tahun 2015-2017

No	Nama Desa	Penerimaan Dana Desa di Kec. Baturaden		
		2015	2016	2017
1.	Puwosari	290.68 2.874	645.77 1.665	823.63 3.032
2.	Kutasari	291.04 3.212	663.99 3.327	847.09 8.314
3.	Pandak	287.29 0.240	634.29 9.857	808.86 0.021
4.	Pamijen	287.48 2.653	634.95 0.488	809.69 7.862
5.	Rempoh	242.93 2.176	689.66 9.967	880.16 3.882
6.	Kebumen	290.03 3.981	643.57 7.508	820.80 7.466
7.	Karangtengah	303.81 2.316	690.16 7.352	880.80 4.398
8.	Kemutug Kidul	291.04 3.212	646.99 0.105	852.20 2.101
9.	Kemutug Lor	287.74 5.694	644.35 0.755	821.80 3.229
10.	Karang Salam	286.77 3.013	635.83 9.932	810.84 3.260
11.	Karang Mangu	282.33 4.667	617.54 3.848	787.28 2.139
12.	Ketenger	286.77 3.013	632.55 0.922	806.60 7.778
Jumlah		3.427.9 47.051	7.779.7 05.744	9.922.8 03.482

Sumber : Kecamatan Baturaden, 2020.

Berdasarkan data pada tabel 2 (dua) di atas, diketahui bahwa jumlah dana desa yang diterimakan kepada seluruh desa di Kecamatan Baturaden Kabupaten

Banyumas mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Desa Ketenger merupakan salah satu desa yang dana desanya meningkat cukup signifikan pada setiap tahunnya,

yaitu hingga 806.607.778 ribu rupiah yang diterimakan pada tahun 2017.

Dengan menggunakan dana desa tersebut, Desa Ketenger melakukan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai jenis kegiatan, termasuk pengembangan desa wisata. Berdasarkan berbagai uraian fakta empiric tersebut, menarik untuk diteliti secara lebih mendalam mengenai partisipasi dan desentralisasi dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Ketenger Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas. Relevan dengan masalah penelitian yang dikaji, penelitian ini melibatkan aspek teoritik mengenai pemberdayaan masyarakat, meliputi partisipasi dan desentralisasi (Moeljarto, 1996:139). Penelitian ini penting untuk dilakukan, mengingat pentingnya keberdayaan masyarakat bagi pengentasan kemiskinan. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Ketenger pada khususnya dan desa-desa lain pada umumnya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Desa Ketenger, Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang memiliki ciri khusus, yaitu menggunakan tools berupa pertanyaan terbuka, teks atau gambar (Creswell, 2014). Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Pemilihan informan dilaksanakan dengan teknik purposive sampling, dengan sasaran

penelitian terdiri dari Aparatur Pemerintah Desa Ketenger, para pengelola program pemberdayaan masyarakat Desa Ketenger, serta unsur masyarakat Desa Ketenger. Upaya analisis data dilakukan menggunakan Model analisis interaktif dari Miles, et al (2014).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dewasa ini, pemberdayaan dianggap sebagai suatu pendekatan yang disarankan untuk digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup individu maupun kelompok (Hendrikus, 2008). Dalam rangkaian proses pemberdayaan masyarakat memiliki 2 (dua) aspek penting, yakni partisipatif dan terdesentralisasi (Moeljarto, 1996). Yang dimaksud dengan partisipatif adalah ketika suatu pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat di dalam prosesnya. Sementara aspek terdesentralisasi merupakan suatu upaya yang ditujukan untuk mendekatkan masyarakat.

Penelitian ini mengkaji secara lebih mendalam mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Desa Ketenger sebagai upaya pengembangan desa wisata. Program pemberdayaan masyarakat tersebut diteliti secara lebih mendalam menggunakan aspek pemberdayaan masyarakat menurut Moeljarto, yaitu partisipasi dan desentralisasi. Aspek-aspek tersebut dijelaskan melalui program pengembangan desa wisata di Desa Ketenger Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas.

Desa Ketenger merupakan salah satu desa di Kecamatan Baturaden yang tingkat kemiskinan cukup tinggi jika dibandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan Baturaden, yaitu sebanyak 258 jumlah

kemiskinan. Hal tersebut menjadikan desa Ketenger sebagai salah satu desa pelaksana program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan di desa tersebut. Berikut

merupakan data jumlah penerimaan program pemberdayaan masyarakat desa dan tingkat kemiskinan di Kecamatan Baturraden sampai dengan tahun anggaran 2020:

Tabel 3. Jumlah Penerimaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Baturraden

No	Nama Desa	Penerimaan program pemberdayaan masyarakat (Rp)	Kemiskinan
1	Purwosari	122.767.300	265
2	Kutasari	204.638.500	364
3	Pandak	289.245.206	204
4	Pamijen	341.686.168	215
5	Rempoah	108.240.467	524
6	Kebumen	259.428.308	341
7	Karangtengah	246.385.255	787
8	Kemutugkidul	234.492.206	397
9	Kemutuglor	346.177.000	268
10	Karang Salam	199.792.932	373
11	Karang Mangu	240.445.500	119
12	Ketenger	96.100.000	258
Jumlah		2.689.398.842	4.115

Sumber: Kecamatan Baturraden, 2020.

Berdasarkan data pada tabel 3 di atas, diketahui bahwa Desa Ketenger memiliki kemiskinan sejumlah 258 dengan penerimaan program pemberdayaan hanya sebanyak 96.100.000 rupiah. Hal tersebut menjadi menarik, karena jika dibandingkan dengan desa lain di kecamatan tersebut, desa Ketenger mendapatkan program pemberdayaan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan desa yang memiliki kemiskinan lebih rendah dari pada Desa

Ketenger, misalnya desa Karang Mangu dengan tingkat kemiskinan hanya sejumlah 199, justru menerima program pemberdayaan masyarakat lebih banyak yaitu sebanyak 230.445.500 rupiah. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa banyaknya program pemberdayaan yang diberikan pemerintah untuk kemudian dilaksanakan oleh Desa Ketenger masih belum representative, sehingga perlu untuk ditingkatkan, mengingat tingginya jumlah

kemiskinan yang terjadi di desa tersebut. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Georga dan Gadjah (2012), yang menyatakan bahwa kekayaan alam yang dilestarikan dapat digunakan sebagai sarana pengembangan desa wisata yang tidak merusak lingkungan.

Program pemberdayaan di Desa Ketenger dilakukan melalui pengembangan Desa Wisata. Desa wisata tersebut dikenal dengan nama Desa Wisata Ketenger yang menawarkan pemandangan indah di lereng Gunung Slamet dan terdapat pula beberapa curug di sekitar Desa Wisata Ketenger. Tidak hanya itu, Desa Wisata Ketenger juga menawarkan berbagai pertunjukkan kesenian dan kebudayaan tradisional, seperti ebeg atau kuda lumping.

Untuk dapat menikmati berbagai pemandangan indah tersebut pengunjung hanya diwajibkan untuk membayar lima ribu rupiah untuk satu orangnya. Harga tersebut belum termasuk tiket masuk ke wilayah air terjun atau curug. Desa Wisata Ketenger mulai beroperasi pada pukul 07.00 hingga pukul 18.00 setiap harinya. Masalah penelitian yang dikaji, penelitian ini melibatkan aspek teoritik mengenai pemberdayaan masyarakat, meliputi partisipasi dan desentralisasi (Moeljarto, 1996:139). Penelitian ini penting untuk dilakukan, mengingat pentingnya keberdayaan masyarakat bagi pengentasan kemiskinan.

### **1. Aspek Partisipasi**

Hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa partisipasi yang terjadi dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Ketenger belum dilaksanakan secara menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan proses pemberdayaan yang dilakukan

masih condong atau dominan pada pengurus saja, masyarakat hanya menjadi bagian dari penikmat wisata yang ditawarkan. Partisipasi masyarakat sekitar sangat diperlukan dalam rangka mendukung proses perencanaan hingga pelaksanaan berbagai usaha pariwisata dapat dilakukan secara berkelanjutan (Okazaki, 2008).

Desa wisata dimaknai sebagai suatu gabungan dari atraksi, akomodasi dan berbagai fasilitas penunjang lainnya yang ditampilkan pada suatu tatanan kehidupan bermasyarakat dengan menyatukan berbagai tradisi yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri (Nurhayanti, 1992).

Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ketenger tidak memiliki inisiatif untuk berpartisipasi dengan mengajukan diri untuk turut mengembangkan Desa Wisata di desanya, namun pada realitanya harus dilakukan penunjukkan oleh pemerintah Desa Ketenger. Hadirnya desa wisata dan berbagai jenis pariwisata lainnya dibuktikan dapat meningkatkan rasa bangga masyarakat atas budaya yang dimilikinya (Arida et al, 2019).

### **2. Aspek Desentralisasi**

Hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa aspek desentralisasi yang terjadi dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Ketenger masih bersifat terpusat, atau top down berdasarkan instruksi atasan saja. Hal tersebut mengakibatkan pemberdayaan yang dilakukan belum didasarkan atas kebutuhan masyarakat desa dan belum memaksimalkan potensi wisata yang ada di Desa Ketenger Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian terdahulu

yang menyatakan bahwa walaupun suatu negara diberikan kekayaan sumber daya alam, kemungkinan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sangat terbatas dikarenakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alamnya belum dilakukan secara berkelanjutan (Birhanu, 2014; Daley, 2015; Wassie, 2020; Zikargae dkk, 2021; Zikarge, 2018).

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi dan desentralisasi dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Ketenger Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas masih membutuhkan peningkatan. Hal tersebut dikarenakan pada aspek partisipasi masih sangat terbatas peran serta masyarakat desa terhadap pelaksanaan program. Sementara pada aspek desentralisasi masih bersifat terpusat berdasarkan instruksi dari pemerintah desa saja. Masyarakat Desa Ketenger masih minim inisiatif untuk berpartisipasi dalam pengembangan desa wisatanya. Sehingga, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Ketenger Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas belum dapat memberdayakan masyarakatnya. Hal tersebut karena pemberdayaan yang diberikan masih sebatas pemberdayaan formal saja.

Bertitik tolak dari kesimpulan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan kepada pemerintah Desa Ketenger untuk dapat mendorong masyarakat desanya untuk berpartisipasi secara aktif dalam program pemberdayaan yang dilaksanakan melalui sosialisasi secara berkala dan

menyeluruh kepada masyarakat Desa Ketenger. Sementara bagi penelitian selanjutnya, peneliti merekomendasikan untuk dapat dilakukan dengan metode dan teori yang berbeda, sehingga hasil penelitian tentang partisipasi dan desentralisasi dalam program pemberdayaan masyarakat akan semakin komprehensif.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU :**

- Birhanu, A. (2014). Environmental Degradation and Management in Ethiopian Highlands: Review of Lessons Learned. *Int. J. Environ. Protect. Pol* (2), 24-34.
- Cresswell, J. W. (2016). *Research Design* edisi 4. Pustaka Belajar.
- Daley, B. (2015). *Environmental Issues in Ethiopia and Links to the Ethiopian Economy*. Crwon, UK. [www.gov.uk/research-for-development-outputs](http://www.gov.uk/research-for-development-outputs).
- Geogra, F., & Gadjah, A. U. (2013). *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi*
- Laverack G. (2007). *Health Promotion Practice: Building Empowered Communities*. Maidenhead: Open University Press.
- Lawson, L. and Kearns, A. (2014), "Rethinking the purpose of community empowerment in neighbourhood regeneration", *Local Economy*, Vol. 29 Nos 1-2, pp. 65-81.
- Miles, Matther B, Huberman dan Saldana. 1984. *Qualitative data Analysis : A Methods Book*. Thousands oaks, CA : Sage Publication.
- Moeljarto, Vidhyandika. (1996). *Pemberdayaan Kelompok Miskin*

- Melalui Program IDT. Jakarta : Centre for Strategic and International Studies.
- Mohan G and Stokke K (2000) Participatory development and empowerment: The dangers of localism. *Third World Quarterly* 21(2): 247–268.
- Nuryanti, W. 1999. *Heritage, Tourism and Local Communities*. Yogyakarta: UGM Press.
- Okazaki, E. (2008). A community-based
- Ras, Atma. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Socius*. Vol. XIV.
- Wallerstein N (2002) Empowerment to reduce health disparities. *Scandinavian Journal of Public Health* 30: 72–77.
- Wassie, S. B. (2020). Natural Resource Degradation Tendencies in Ethiopia: A Review. *Environ. Sys. Res.* 9, 33.
- Williams, G. (2004). Evaluating participatory development: Tyranny, power and (re) politicisation. *Third World Quarterly*, 25(3), 557–578.
- Woolcock M and Sweetser AT (2002) Bright ideas: Social capital—the bonds that connect.
- Zikargae, M. H. (2018). Analysis of Environmental Communication and Its Implication for Sustainable Development in Ethiopia. *Sci. Total Environ.* 634. 1593-1600.
- Zikargae, M. H. (2021). Assesment of Applying Global Instruments in Non Governmental Organizations for Environmental Security and Sustainable Development in Developing Countries. *Educ. Res. Int* 1-11.